

TRANSFORMASI DIGITAL PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Eka Wahyu Hidayat*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Transformasi digital telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong partisipasi publik dalam kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif oleh Milles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi *digital* telah berdampak signifikan terhadap partisipasi publik dalam proses kebijakan. *Digital government*, melalui pemanfaatan teknologi, memengaruhi partisipasi publik dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah, memfasilitasi diskusi dan aspirasi publik, mengatasi tantangan kesenjangan digital, mencegah penyebaran informasi palsu, dan meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: transformasi digital, partisipasi publik, pembuatan kebijakan

Abstract

Digital transformation has become a crucial element in enhancing public engagement in the policy-making process. This transformation is part of the government's efforts to improve public services and encourage public participation in policy. This study employs a qualitative approach with data obtained from literature review. Data analysis is conducted using the interactive analysis model by Milles and Huberman. The findings indicate that the adoption of digital technology has significantly impacted public participation in the policy process. Digital government, through the utilization of technology, influences public participation by providing easier access to information, facilitating public discussions and aspirations, addressing the challenges of the digital divide, preventing the spread of false information, and increasing involvement in decision-making processes.

Keywords: *digital transformation, public participation, policy-making*

INTRODUCTION

Sejak munculnya konsep *digital government* (pemerintahan digital), arah tata kelola telah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya berfokus pada regulasi dan pengawasan, kemudian berkem-

bang melalui transaksi, layanan, interaksi, dan kepuasan, hingga kini menekankan pada kolaborasi dan partisipasi. Tujuannya adalah agar pemerintah bersikap transparan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan (Lee et al., 2018).

Transformasi digital kini menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Transformasi digital bertujuan untuk memperkuat layanan publik serta mendorong keterlibatan warga dalam pembuatan kebijakan, sejalan dengan komitmen pemerintah.

Salah satu elemen penting dari transformasi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, *eRulemaking Programs* di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan pendapat publik dengan lebih efektif. Hubungan antara kebijakan, nilai-nilai, dan hasil-hasilnya sering kali sulit dipahami oleh warga dan pembuat kebijakan karena kompleksitas siklus kebijakan. Namun, dengan terbukanya data oleh administrasi publik, kini ada peluang yang lebih besar untuk transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pembuatan kebijakan (Sivarajah et al., 2016).

Menurut Suherlan (2023), perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru yang memungkinkan partisipasi publik semakin meningkat di setiap tahap proses demokrasi (Congge et al., 2023).

Transformasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital telah menyediakan lebih banyak *platform* yang beragam untuk meningkatkan partisipasi publik dalam dinamika politik dan pengambilan keputusan (Suherlan, 2023).

Melalui penggunaan *platform* digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan mereka, yang pada akhirnya

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Digital government sebagai konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Transformasi digital dalam pemerintahan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat ke layanan publik dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan warga negara.

Menurut Demirhan dan Öktem (2011), partisipasi politik warga negara adalah syarat penting untuk mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan politik (Verba et al., 1995). Selain itu, organisasi masyarakat sipil dianggap sebagai motivator utama untuk mendorong warga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Lombardi et al., 2010).

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan diatur oleh berbagai undang-undang yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan peraturan daerah. Ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang mencerminkan keinginan masyarakat.

Di Indonesia, hak masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan peraturan daerah diatur oleh berbagai undang-undang yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam pemerintahan. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi:

Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 96 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masu-

kan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Masukan tersebut dapat berupa usulan, saran, atau pendapat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyusunan peraturan daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 354 menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus melibatkan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui konsultasi publik.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Meskipun fokus utama Undang-Undang ini adalah pada pelayanan publik, Pasal 19 menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam proses perumusan kebijakan publik, yang meliputi penyusunan peraturan daerah.

Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri ini memperjelas prosedur dan mekanisme penyusunan peraturan daerah, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik guna memperoleh masukan dari masyarakat.

Dengan regulasi-regulasi tersebut, masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan daerah, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Meskipun demikian, tantangan dalam menerapkan transformasi digital masih ada, terutama dalam hal optimalisasi teknologi dan memastikan bahwa semua kalangan masyarakat memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus membuka ruang bagi partisipasi publik dan menerima masukan, serta mengembangkan kebijakan inovatif untuk menghadapi kompleksitas layanan publik di era digital.

Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mengubah cara layanan publik disampaikan, tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan, menjadikannya lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2018).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah berbagai peraturan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumentasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Milles dan Huberman (2014). Analisa interaktif dalam penelitian ini yaitu ketiga kom-

ponen aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus dengan tahapan berupa *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digital Government

Digital government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan cara bekerja sama, menyediakan informasi yang relevan, dan melibatkan warga negara (Kalsi & Kiran, 2015).

Dengan kemajuan teknologi digital yang semakin luas, pemerintah juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan pemerintahan digital. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), konsep ideal untuk *digital government* disebut *good government* yang melibatkan empat prinsip utama.

Istilah *digital government* digunakan untuk menggambarkan sistem dan cara berpikir yang membantu menciptakan akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan berbasis digital. Ini mencakup penggunaan situs *web*, media sosial, dan berbagai alat digital lainnya. Sistem ini penting untuk mengurangi masalah dalam manajemen organisasi, seperti tumpang tindih tugas dan peran.

Dalam praktiknya, UNDP mengacu pada empat prinsip utama untuk menilai pemerintahan digital yang baik, atau yang dikenal sebagai *good governance*. Keempat prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan pada hukum.

Transparansi dalam pemerintahan harus memastikan bahwa semua catatan bisa diakses dengan aman oleh semua pihak yang terlibat. Akuntabilitas berarti semua kebijakan, informasi, data, dan produk hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterbukaan penting untuk melibatkan semua pihak yang ingin memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, pengelolaan harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

Dalam hal ini, elemen seperti internet, media sosial yang menghubungkan orang, *platform online* yang mendorong interaksi, dan aplikasi seluler yang memperluas akses, telah secara signifikan mempermudah individu untuk mendapatkan informasi dan wawasan dalam bidang politik (Appel et al., 2020; Suherlan, 2023).

Implementasi *Digital Government* Di Indonesia

Administrasi publik telah mengembangkan berbagai strategi untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan. Dua konsep utama terkait dengan tren ini adalah *e-government* dan *e-participation* (Errandonea, L., 2023). *E-government* berfokus pada cara pejabat pemerintah mengimplementasikan keputusan (Marche & McNiven, 2003). Sementara itu, *e-participation* mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi konsultasi dan dialog *online* antara pemerintah dan warga negara (Errandonea, L., 2023).

Di Indonesia, beberapa inisiatif *digital government* yang telah diterapkan meliputi berbagai *platform* dan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan serta memfasilitasi partisipasi publik diantaranya adalah:

1. Sistem Layanan Perizinan Terpadu Elektronik (*Online Single Submission - OSS*). OSS adalah sistem yang mengintegrasikan semua proses perizinan usaha di Indonesia secara digital. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan dan memproses perizinan secara *online*, yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan.
2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). LAPOR! adalah *platform* pengaduan *online* yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan atau aspirasi terkait pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. *Platform* ini terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah.
3. e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). e-KTP adalah program identitas digital yang mencatat data penduduk secara terpusat. Kartu ini berfungsi sebagai identitas resmi yang digunakan untuk berbagai layanan publik, termasuk pemilu, layanan kesehatan, dan perbankan.
4. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diintegrasikan dengan LAPOR! Adalah inisiatif untuk mengelola pengaduan masyarakat terhadap layanan publik secara efektif, dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
5. SiMAYA adalah aplikasi untuk mengelola surat-menyurat dan tata naskah dinas secara elektronik. Aplikasi ini digunakan oleh instansi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi.
6. Jakarta *Smart City*. Inisiatif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan. *Platform* ini mencakup aplikasi seperti *Qlue* (untuk pengaduan warga), aplikasi *Jak-WIFI* (akses internet gratis di ruang publik), dan data portal untuk transparansi informasi publik.
7. *e-Procurement* atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem digital yang digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi.
8. Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik melalui integrasi sistem dan data antar instansi pemerintahan secara digital.

Inisiatif-inisiatif dari pemerintah di atas, merupakan langkah signifikan menuju penerapan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Partisipasi Publik dalam *Digital Government*

Partisipasi adalah proses di mana warga negara menyampaikan ide, pendapat, perasaan, keinginan, dan kritik mereka

kepada pemerintah. Ini terjadi selama berbagai tahap, seperti persiapan kebijakan, pengembangan solusi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan masa-lah publik (Demirhan & Öktem, 2011).

Partisipasi publik berarti keterlibatan aktif orang-orang dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di suatu komunitas (Ohara, 2023; Suherlan, 2023). Tujuan dari partisipasi publik adalah untuk memberikan informasi, melibatkan masyarakat sejak awal dalam pengambilan keputusan, mempertimbangkan harapan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk mempengaruhi hasil keputusan (O'Faircheallaigh, 2010).

Literatur menunjukkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki hubungan dengan warga negara. Ini termasuk menyediakan informasi terbaru tentang acara dan proyek pemerintah, memberi tahu dan mengarahkan masyarakat selama bencana seperti banjir atau wabah, mengkomersialkan layanan publik, dan mengumpulkan umpan balik dari warga yang terlibat (Luciano et al., 2018; Al-Aufi et al., 2018). Media sosial, dengan kemampuannya menyebarkan informasi, membangun hubungan, dan berfungsi dalam percakapan serta konektivitas, telah dengan cepat diterima oleh organisasi pemerintah (Chen et al., 2016). Media sosial menawarkan cara baru bagi pemerintah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, dan layanan publik (Luciano et al., 2018).

Tata kelola yang lebih partisipatif merespons masalah dan tantangan yang

kompleks, melampaui pandangan tradisional (Pereira et al., 2020).

Tata kelola telah berkembang dari sekadar menyediakan informasi dan layanan melalui teknologi komunikasi ke model tata kelola yang melibatkan partisipasi (Gil-Garcia & Martinez-Moyano, 2007). Banyak penelitian menunjukkan dua aspek penting dari perkembangan e-pemerintahan. Pertama, *e-government* telah berubah dari sekadar kehadiran di internet menjadi aplikasi yang lebih interaktif dan terintegrasi (Katsonis & Botros, 2015). Kedua, secara umum, badan-badan pemerintah telah mulai menambah perbaikan dalam organisasi dan teknologi, dan pemerintah daerah juga mulai mengikuti tren ini (Gil-Garcia & Martinez-Moyano, 2007). Para peneliti juga mengusulkan teori tentang bagaimana teknologi, jaringan sosial, dan proses organisasi berkembang bersamaan untuk menjelaskan perubahan dalam tata kelola (Misra et al., 2018).

Dalam melaksanakan *digital government*, pemerintah harus fokus pada nilai, tujuan, dan manfaatnya, terutama untuk masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan dan informasi pemerintah yang jelas dan transparan akan meningkatkan partisipasi publik. Ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan kebijakan, memberikan masukan tentang produk dan hukum pemerintah, serta mengawasi jalannya sistem pemerintahan itu sendiri.

Partisipasi publik tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan harapan, dan memantau kinerja pemerintah. Dengan cara ini, tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Selain

itu, ini mendukung demokrasi yang sehat, di mana suara masyarakat memiliki dampak nyata dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Kemajuan teknologi digital yang cepat telah membawa perubahan besar, dan salah satu dampak utamanya adalah terciptanya saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara (Chen et al., 2021; Suherlan, 2023). Dengan adanya berbagai *platform online*, seperti media sosial yang sangat populer, warga sekarang dapat berinteraksi langsung dengan pemimpin politik mereka (Aytac, 2024; Suherlan, 2023).

Dengan partisipasi publik yang baik, pemerintah bisa menjalankan peran dan tugasnya lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini memungkinkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, keterlibatan publik tidak hanya penting tetapi juga menjadi dasar untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang fokus pada pelayanan dan partisipasi publik akan memberikan manfaat besar bagi semua pihak.

Peran media sosial sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat sangatlah penting. Melalui media sosial, kampanye politik dapat dijalankan, petisi *online* diorganisir, dan kampanye sosial menyebar dengan cepat di dunia digital (Lorenz-Spreen et al., 2022). Ini memberi kesempatan bagi semua orang untuk ikut serta dalam kampanye atau menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu yang berkembang. Menariknya, partisipasi dalam kampanye tidak hanya dilakukan secara fisik melalui demonstrasi atau pertemuan, tetapi juga bisa dilakukan dengan mudah melalui

internet (Abela et al., 2023; Suherlan, 2023).

Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan sangat penting karena beberapa alasan utama:

1. Mencerminkan aspirasi publik. Kebijakan yang baik harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, pembuat kebijakan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan merumuskan solusi yang lebih tepat
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mendukung pelaksanaan kebijakan. Partisipasi publik tidak hanya penting pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Dukungan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterima dan dilaksanakan dengan baik
4. Membangun kepercayaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Ketika masyarakat merasa suaranya dideengar, mereka cenderung lebih percaya pada pemerintah dan sistem yang ada.
5. Kontrol sosial. Partisipasi publik juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, tin-

dakan penyelewengan atau kebijakan yang tidak sesuai dapat terdeteksi lebih awal.

Secara keseluruhan, partisipasi publik dalam kebijakan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa partisipasi yang aktif, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang ada dan dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Teknologi menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan partisipasi publik. Teknologi memudahkan orang untuk mengakses informasi tentang kebijakan, program pemerintah, dan masalah sosial. Ini membantu individu tetap tahu dan membuat keputusan yang lebih baik.

Platform seperti media sosial dan situs web menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan terlibat dalam percakapan publik. Ini mempermudah komunikasi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Contohnya, aplikasi survei dan forum online memudahkan orang untuk memberikan masukan dan suara mereka secara langsung. Selain itu, teknologi memungkinkan partisipasi tanpa harus berada di tempat fisik. Orang dari berbagai daerah, termasuk yang terpencil, bisa ikut serta dalam diskusi dan kegiatan publik tanpa harus hadir secara langsung.

Implikasi Digital Government

Dampak yang dimiliki warga negara terhadap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat dan proses pembuatan kebijakan secara umum dikenal sebagai "partisipasi warga negara." Partisipasi ini bisa lebih meningkat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, karena membuatnya lebih mudah diakses dan lebih hemat biaya (Simonofski et al., 2021).

Seperti halnya teknologi dan inovasi lainnya, *digital government* memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, alat dan platform digital bisa memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses ke informasi terbaru dan memperkenalkan mereka pada perkembangan global. Di sisi lain, penerapan teknologi dalam pemerintahan memungkinkan setiap warga negara untuk menggunakan layanan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam sistem mereka.

Di sisi lain, teknologi yang sama juga bisa disalahgunakan dan merusak sistem masyarakat yang terbuka dan demokratis. Misinformasi dan data yang tidak akurat bisa menyebar dengan cepat, mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, jika institusi atau individu yang tidak bertanggung jawab memanipulasi sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dampaknya bisa semakin buruk. Percepatan teknologi digital juga seringkali lebih cepat daripada perkembangan kebijakan dan hukum yang mengaturnya.

Teknologi, khususnya di era digital sekarang, telah memberikan dampak besar pada partisipasi publik dalam ber-

bagai bidang, termasuk politik dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa implikasi dari *digital government* yang mempengaruhi partisipasi publik melalui penggunaan teknologi:

1. Akses informasi yang lebih mudah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Internet dan media sosial menyediakan *platform* bagi orang untuk mendapatkan berita, informasi kebijakan, dan perkembangan terbaru yang sebelumnya sulit diakses. Ini mendorong masyarakat untuk lebih mengetahui dan aktif dalam diskusi publik.
2. Memfasilitasi diskusi dan suara publik. Teknologi mempermudah masyarakat untuk ikut serta dalam diskusi politik dan memberikan suara mereka. Dengan menggunakan *platform online*, orang bisa menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif.
3. Tantangan kesenjangan digital. Walaupun teknologi memberikan banyak kesempatan, ada tantangan seperti kesenjangan digital yang perlu diatasi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi, yang bisa menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi. Karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua orang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
4. Penyebaran informasi palsu yang bisa mempengaruhi opini publik dan partisipasi. Untuk mengatasi ini, ma-

sarakat perlu memiliki keterampilan literasi digital yang baik agar bisa membedakan antara informasi yang benar dan yang salah.

5. Meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi, masyarakat bisa lebih mudah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, melalui survei *online*, forum diskusi, dan aplikasi yang memungkinkan pengumpulan suara, orang dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah.

Secara umum, teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dengan menggunakan teknologi secara bijak, masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah berdampak besar pada cara masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya *platform online*, kemudahan akses informasi, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan pemimpin politik, individu kini dapat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Meski ada banyak manfaatnya, tantangan dan risiko tetap harus diatasi agar partisipasi masyarakat di era digital benar-benar dapat berkontribusi pada kebijakan publik.

Beberapa inisiatif *digital government* yang telah diterapkan meliputi berbagai *platform* dan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan serta memfasilitasi partisipasi publik diantaranya

adalah Sistem Layanan Perizinan Terpadu Elektronik (*Online Single Submission - OSS*), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (*LAPOR!*), e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (*SP4N*), *SiMAYA*, Jakarta *Smart City*, *e-Procurement* (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*).

Implikasi *digital government* melalui pemanfaatan teknologi yang dapat mempengaruhi partisipasi publik berupa akses informasi yang lebih mudah, memfasilitasi diskusi dan suara publik, tantangan kesenjangan digital, penyebaran informasi palsu, serta meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Abela, M.R., Maxwell, H., Bindoff, A., Alty, J., Farrow, M. and Lawler, K., 2023. Pushing through the barriers: peer advice to increase physical activity and reduce dementia risk from participants in a massive open online Alzheimer's focused course. *The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease*, 10(3), pp.503-512.
- Al-Aufi, A.S., Al-Harhi, I., AlHinai, Y., Al-Salti, Z. and Al-Badi, A., 2017. Citizens' perceptions of government's participatory use of social media. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(2), pp.174-194.
- Aytac, U., 2024. Digital domination: Social media and contestatory democracy. *Political Studies*, 72(1), pp.6-25.
- Chen, C.L., Lin, Y.C., Chen, W.H., Chao, C.F. and Pandia, H., 2021. Role of government to enhance digital transformation in small service business. *Sustainability*, 13(3), p.1028.
- Chen, Q., Xu, X., Cao, B. and Zhang, W., 2016. Social media policies as responses for social media affordances: The case of China. *Government information quarterly*, 33(2), pp.313-324.
- Congge, U., Guillamón, M.D., Nurmandi, A., Salahudin and Sihidi, I.T., 2023. Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5, pp. 1-11
- Creswell, J. W. and Creswell, J. D. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. Sage Publications. Singapore
- Demirhan, K. and Öktem, M.K., 2011. Electronic participation in the policy making process: A case study. *International Journal of eBusiness and eGovernment studies*, 3(1), pp.59-78.
- Errandonea, L., 2023. *Exploring the impact of digital transformation on public governance. A community perspective*, Schade, S. (Editor), Publications Office of the European Union, Luxembourg
- Gil-Garcia, J.R. and Martinez-Moyano, I.J., 2007. Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government information quarterly*, 24(2), pp.266-290.

- Kalsi, N.S. and Kiran, R., 2015. A strategic framework for good governance through e-governance optimization: A case study of Punjab in India. *Program*, 49(2), pp.170-204.
- Katsonis, M. and Botros, A., 2015. Digital government: a primer and professional perspectives. *Australian Journal of Public Administration*, 74(1), pp.42-52.
- Lee, J., Kim, B.J., Park, S., Park, S. and Oh, K., 2018. Proposing a value-based digital government model: Toward broadening sustainability and public participation. *Sustainability*, 10(9), p.3078.
- Lombardi, P., Huovila, P. and Sunikka-Blank, M., 2010. The potential of e-participation in sustainable development evaluation: Evidence from case studies. In *Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery* (pp. 1-16). IGI global. USA
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S. and Hertwig, R., 2023. A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature human behaviour*, 7(1), pp.74-101.
- Luciano, E.M., Wiedenhöft, G.C. and Santos, F.P.D., 2018, May. Promoting social participation through digital governance: Identifying barriers in the Brazilian public administration. In *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age* (pp. 1-9).
- Marche, S. and McNiven, J.D., 2003. E-government and e-governance: the future isn't what it used to be. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 20(1), pp.74-86.
- Miles, M.B. and Huberman, A. M., 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications.
- Misra, A., Misra, D.P., Mahapatra, S.S. and Biswas, S., 2018, May. Digital transformation model: analytic approach on participatory governance & community engagement in India. In *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age* (pp. 1-7).
- O'Faircheallaigh, C., 2010. Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making. *Environmental impact assessment review*, 30(1), pp.19-27.
- Ohara, M. R. 2023. The Role of Social Media in Educational Communication Management. *Journal of Contemporary Administration and Management*, 1(2), pp. 70-76
- Pereira, G.V., Luna-Reyes, L.F. and Gil-Garcia, J.R., 2020, September. Governance innovations, digital transformation and the generation of public value in Smart City initiatives. In *Proceedings of the 13th*

International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (pp. 602-608).

- Simonofski, A., Fink, J. and Burnay, C., 2021. Supporting policy-making with social media and e-participation platforms data: A policy analytics framework. *Government Information Quarterly*, 38(3), p.101590.
- Sivarajah, U., Weerakkody, V., Waller, P., Lee, H., Irani, Z., Choi, Y., Morgan, R. and Glikman, Y., 2016. The role of e-participation and open data in evidence-based policy decision making in local government. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 26(1-2), pp.64-79.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suherlan, S., 2023. Digital Technology Transformation in Enhancing Public Participation in Democratic Processes. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(1), pp.10-17.
- Verba, S., Schlozman, K.L. and Brady, H.E., 1995. *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press. Cambridge